BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 10 Maret 2008
Halaman : 14

Masyarakat Dukung Pencabutan PP Penyewaan Hutan

[JAKARTA] Kampanye kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sedang menggalang dukungan masyarakat terkait penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan, mendapat respon luas biasa dari masyarakat.

Setelah dua minggu kampanye pencabutan regulasi yang dikenal dengan PP Penyewaan Hutan ini dilakukan, sudah ribuan warga menyatakan dukungannya.

Koordinator Kampanye Isu Hutan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rully Syumanda, di Jakarta, Senin (10/3), mengatakan, hingga hari ini sudah 1.200 warga yang menyatakan dukungannya melalui pesan singkat telepon seluler dan surat elektronik.

Sedangkan untuk warga yang mendonasikan uangnya berjumlah 500 orang yang akan melindungi sekitar 1.600 hektare (ha) luas hutan dengan nilai Rp 48 juta atau rata-rata Rp 300/m2.

Menurut Rully, masyarakat yang mendukung kampanye ini berasal dari semua golongan mulai dari pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, artis, hingga buruh bangunan.

Seperti diketahui pada tanggal 4 Februari 2008, pemerintah mengeluarkan PP yang mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, dan infrastruktur telekomunikasi dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun.

Menurut Walhi, pembukaan tambang di hutan akan menimbulkan kerusakan secara permanen karena aktivitas penambangan memiliki daya musnah yang luar biasa karena tidak saja terjadi pada kawasan yang dibuka namun juga pada kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas masyarakat.

PP ini, menurut Walhi, akan meluluhlantakkan lebih dari 900.000 ha hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan oleh 13 perusahaan. PP ini sekaligus berpotensi untuk memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang lainnya untuk mengobrak- abrik 11,4 juta hektare hutan lindung lainnya. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup